

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PDRB PERKAPITA DAN PERTUMBUHAN  
EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
KOTA JAMBI TAHUN 2010-2020**



**PROPOSAL SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada  
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi

**OLEH**

**NAMA : Helena Holviana Sitanggang**

**NIM : 1700860201013**

**PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
TAHUN 2022**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Dengan ini komisi Pembimbing Skripsi dan Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Helena Holviana Sitanggang  
Nomor Induk Mahasiswa : 1700860201013  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Judul Skripsi : PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PDRB PERKAPITA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2010-2013

Telah memenuhi persyaratan dan layak untuk di uji pada ujian komprehensif sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi.

Jambi, Februari 2022

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

A:

(Dr. Pantun Bukit S.E, M.Si)

(Hj. Fathiyah, SE, M.Si)

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

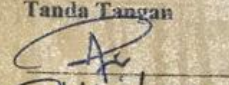
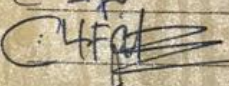

(Hj. Susilawati, SE, M.Si)

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi dan Komprehensif  
Falkutas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 18 Maret 2022  
Jam : 09.00 – 11.00  
Tempat : Ruang Sidang Falkutas Ekonomi Universitas Batanghari

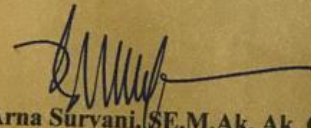
**PANITIA PENGUJI**


Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dr. M. Zahari SE. M,Si	Ketua	
Hj. Fathiyah SE. M,Si	Sekretaris	
Dr. Sudirman SE. M,Si	Penguji Utama	
Dr. Pantun Bukit SE.M,Si	Anggota	

Disahkan Oleh

Dekan Falkutas Ekonomi  
Universitas Batanghari

Ketua Program Studi  
Manajemen

  
Dr. Hj. Arna Suryani, SE,M.Ak, Ak. CA., CMA

  
Hj. Susilawati, SE, M.Si



### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Helena Holviana Sitanggang  
NIM : 1700860201013  
Program : Ekonomi  
Konsentrasi : Ekonomi Pembangunan  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Pantun Bukit SE. M,Si  
2. Hj. Fathiyah SE. M,Si  
Judul Skripsi : **Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB Perkapita Dan  
Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak  
Daerah Kota Jambi Tahun 2010-2020**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan berdasarkan hasil penelitian , pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, bahwa data-data yang saya cantumkan pada skripsi ini adalah benar bukan hasil rekayasa, bahwa skripsi ini adalah karya orisinal bukan hasil plagiarisme atau di upah pada pihak lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jambi, Maret 2022



Helena Holviana S  
Nim. 1700860201013

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang telah saya susun sedemikian rupa ini yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2010-2020”.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana pada fakultas Ekonomi Universitas Batang Hari Jambi. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada orang tua dan saudara-saudara serta para teman saya yang selama ini telah memberikan dorongan moral, semangat dan material serta doa yang tulus.

Pada kesempatan ini saya akan mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya, kepada”

1. Orang tua penulis ayah (H. Sitanggung), Ibu ( Maria Uli Sinurat ), dan saudar kandung saya (Lini Heldawati dan Lidya Oktavia) serta keluarga besar yang selalu memberikandoa dan dukungan agar terselesainya skripsi ini.
2. Bapak H. Fachruddin Razi, SH, M.H. Selaku Rektor di Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Dr. Arna Suryani, S.E, A.K, C.A, CMA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi
4. Ibu Hj. Susilawati, S.E, M.Si. Selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan.
5. Bapak Dr. Pantun Bukit, SE, M.Si selaku Pembimbing Skripsi I yang selalu memberikan masukan dan

telah sabarmenghadapi tingkah saya sebagai mahasiswa bimbingan bapak sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Hj. Fathiyah SE, M.Sis selaku Pembimbing II saya yang mau meluangkan waktunya untuk membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen Ekonomi Pembangunan beserta jajaran staff yang ada di Ekonomi Pembangunan Universitas Batanghari Jambi.
8. Sahabat serta teman seangkatan ekonomi pembangunan 2017 tekhusus Lorenzo Lamas, Sion Sihotang dan Susi Susanti, dan syuluki.
9. Untu sahabat saya (alumni SMP) saya yang selal mendukung dan memberik semangat selalu.
10. Untuk Nabilah Putri Risa, Liza Dwi Febrianti, Clara Jeanny Zendrato dan Andre Samuel Purbatelah membantu dan memberik semangat.
11. Semua yang terlibat dalam kehidupan saya, terimakasih sudah hadir dan menemani.
12. Dan terimakasih untuk diri sendiri.

FILIPPI 4: 13

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang member kekuatan kepadaku.

## ABSTRACT

**Nama :HelenaHolvianaSitanggang / Nim : 1700860201013 / 2022 / Batanghari University / Faculty Economics / economic development/ The Effect of Population, Per capita GRDP and Economic Growth on Jambi City Regional Tax Revenue in 2010-2020 / Advisor 1nd Dr. Pantun B, SE,MSi Advisor 2nd Hj. Fathiyah, SE, M.Si**

Regional Original Revenue is one of the financial sources owned by the region. Local revenue comes from various components such as local taxes, regional levies, BUMD profits and other legitimate income. PAD is expected to be a legitimate financial source that can be relied upon in the implementation of regional autonomy.

In order to measure the factors that affect the revenue of the region's original revenue in the district/city of Barsela, first a formulation is used to find the relationship between the independent variables which are divided into three elements, namely, (X1) Population, (X2) GRDP Per capita, (X3) Economic Growth and dependent variable (Y) Local Tax.

So t Partial Testing, Total Population (X1) Affects Regional Taxes. From the table the value of  $t_{count} = 1.004$ , which means  $t_{count} > t_{table}$  ( $1.004 < 2.447$ ) with a significant  $0.354 > 0.05$  then  $H_0$  is accepted and  $H_a$  is rejected. This means that partially there is no significant effect between the Total Population (X1) on Regional Tax (Y) in Jambi City in 2010 - 2020. Partial Testing, namely GRDP Per capita (X2) Affects Regional Taxes. From the table the value of  $t_{count} = 9.107$  which means  $t_{count} > t_{table}$  ( $9,107 > 2.447$ ) with a significant  $0.000 < 0.05$ , then  $H_0$  is rejected and  $H_a$  is accepted. This means that partially there is a significant influence between GRDP Per capita (X1) on Regional Tax (Y) in Jambi City in 2010 - 2020. Partial Testing, namely Economic Growth (X3) Affects Regional Taxes. From the table the value of  $t_{count} = 1.004$  which means  $t_{count} > t_{table}$  ( $-3.102 < 2.447$ ) with a significant  $0.021 > 0.05$  then  $H_0$  is accepted and  $H_a$  is rejected. This means that partially there is no but significant effect between Economic Growth (X1) on Regional Taxes (Y) in Jambi City in 2010 - 2020.

So  $F_{count} > F_{table}$ . Or it can also be seen from the significant value obtained at 0.000 where the significance value is smaller than the significance value used, which is 0.05 or  $0.000 < 0.05$ . This means that this study can explain the relationship between the independent variables, namely the population (X1), Per capita GRDP (X2) and Economic Growth (X3) simultaneously have a significant effect on the dependent variable, namely Regional Tax (Y).

**Keywords :Population, Per capita GRDP, Economic Growth and Regional Tax Revenue**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>TANDA PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan Penelitian .....	8
1.5 Manfaat Penelitian .....	8
1.5.1 Manfaat Akademik.....	8
1.5.2 Manfaat Praktis .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN</b> .....	9
2.1 Landasanteori .....	9
2.1.1 PendapatanaSeli Daerah .....	9
2.1.2 JumlahPenduduk .....	23
2.1.3 ProdukDomestik Regional Bruto.....	25
2.1.4 PertumbuhanEkonomi .....	32
2.1.5 Hubungan Antar Variabel .....	37
2.1.6 Penelitianterdahulu .....	40
2.1.7 KerangkaPemikiran.....	42
2.1.8 Hipotesis .....	43
2.2 Metode Penelitian.....	44
2.2.1 Jenis Dan Sumber Data .....	44
2.2.2 Metode Pengumpulan Data.....	44
2.2.3 Metode Alat Analisis.....	45
2.2.4 Metode Analisis .....	45
2.2.5 Uji KoefesienDeterminasi.....	48
2.2.6 Uji Hipotesis.....	49
2.2.7 OperasionalVariabel.....	52



<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>53</b>
3.1. Sejarah singkat badan pengolahan pajak Kota Jambi.....	53
3.2 Keadaan Geografis .....	54
3.3 Demografi.....	57
3.4 Kondisi Perekonomian.....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	61
4.1.1 Regresi Linear Berganda .....	61
4.1.2 Uji Asumsi Klasik.....	63
4.1.3 Pengajuan Hipotesis.....	67
4.1.3.1 Uji F.....	68
4.1.3.2 Uji t.....	69
4.1.4 Koefisien Determinasi.....	71
4.2 Pembahasan.....	72
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>76</b>
5.1 Kesimpulan .....	76
5.2 Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

### No.Lampiran

1. Tabel Data Variabel.....
2. Hasil Olah Spss.....

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan, bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah bisa dengan bebas memaksimalkan pendapatan asli daerah melalui potensi ekonomi yang dimiliki daerah masing-masing. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan kemampuan daerah. Terkait dengan hal itu, pemerintah daerah diharapkan semakin mendekatkan diri dalam berbagai kegiatan pelayanan public guna meningkatkan tingkat kepercayaan, diharapkan tingkat partisipasi public terhadap pemerintah daerah juga semakin tinggi (Riri, 2016:275).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah.

Pendapatan asli daerah berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggalisemaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga,

dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yang signifikan dalam hal pembiayaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan dua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), disamping penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD lain-lain yang sah. Peranan PAD semakin tinggi dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Memah:2013) Dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang

sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkatkan seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan (Dotulong Dkk:2014).

Sumber penerimaan pendapatan asli daerah terbesar adalah pajak daerah. Pajak daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam penerimaan PAD yang

dimana menjadi penerimaan yang akan bisa pemerintah lakukan pembangunan daerah. Apalagi pemerintah daerah Kota Jambi sedang mencari dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Yang dimana penerimaan Pajak Daerah menjadi suatu kontribusi pendapatan asli daerah.

Berikut tabel 1.1 Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2010-2020 :

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2010-2020**

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Perkembangan (%)
2010	35,538,902,882	-
2011	59,570,219,208	67,61
2012	73,344,781,707	23,12
2013	91,476,549,341	24,72
2014	12,824,086,123	40,82
2015	147,889,448,423	14,79
2016	158,741,000,000	7,33
2017	201,429,136,841	26,89
2018	215,444,388,499	6,95
2019	255,915,388,499	18,78
2020	216,961,981,307	(15,22)
Rata-rata		21,57

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 di atas perkembangan pajak daerah mengalami fluktuasi dengan rata-rata perkembangan 21,57% yang dimana pada tahun 2011 realisasi perkembangan pajak daerah 67,61% merupakan perkembangan tertinggi, yang terendah pada tahun 2020 sebesar -15,22%.



Jumlah penduduk menjadi faktor terpenting dalam penerimaan pajak daerah yang dimana perkembangan Jumlah Penduduk dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, karena seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah maka akan berpotensi meningkatkan jumlah wajib pajak sehingga nantinya penerimaan pajak juga meningkat. Sehubungan dengan bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah (saputra, sidjana:2014).

Berikut tabel 1.2 Jumlah penduduk kota jambi :

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Jambi Tahun 2010-2020**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Perkembangan (%)
2010	534.500	-
2011	543.193	1,62
2012	551.714	1,56
2013	560.188	1,53
2014	568.062	1,40
2015	576.067	1,40
2016	583.487	1,28
2017	591.134	1,31
2018	598.103	1,17
2019	604.376	1,04
2020	611.353	1,15
Rata-rata:		<b>1,34</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2021

Berdasarkan tabel 1.2 perkembangan jumlah penduduk mengalami fluktuasi tiap tahun dengan perkembangan rata-rata pertahun sebesar 1,34%.

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah yaitu dari pendapatan per kapita wajib pajak. Hal ini dapat mempengaruhi seseorang untuk membayar pajak dan patuh akan membayar pajak. Semakin tinggi pendapatan per kapita akan semakin besar penerimaan pajak daerah kota Jambi. Berikut tabel 1.3 pendapatan per kapita Kota Jambi :

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Jambi Tahun 2010-2020**

Tahun	PDRB Per Kapita (Rp)	Perkembangan (%)
2010	20,711.636,30	-
2011	23,594.033,50	13,91
2012	26,500.971,40	12,32
2013	29,604.248,90	11,71
2014	33,407.500,00	12,84
2015	36,963.500,00	10,64
2016	41,827.000,00	13,15
2017	44,481.100,00	6,34
2018	48,369.100,00	8,74
2019	51,023.760,00	5,48
2020	49.183.200,00	(3,60)
Rata-rata :	<b>9,15</b>	

*Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2021*

Berdasarkan tabel 1.3 perkembangan PDRB per kapita kota Jambi seiring setiap tahunnya mengalami fluktuasi dengan rata-rata perkembangan 9,153%

yang dimana perkembangan tertinggi sebesar 13,91% ,sedangkan perkembangan terendah ada pada tahun 2020 sebesar -3,60%.

Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator penting dalam menentukan arah pembangunan. Pertumbuhan Ekonomi sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara atau wilayah secara berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik. (Asmuruf et al, 2015)

Berikut tabel 1.4 persentase Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi Tahun 2010-2020 :

**Tabel 1.4**  
**Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADHK Kota Jambi Tahun 2009-2020**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADHK (%)
2009	6,47
2010	6,66
2011	6,97
2012	7,67
2013	8,5
2014	8,17
2015	5,56
2016	6,81
2017	4,68
2018	5,48
2019	4,79
2020	3,28
Rata-rata :	<b>5,56</b>

*Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2021*

Berdasarkan tabel 1.4 pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dari tahun 2010-2014 mengalami perkembangan yang terus positif,

haltersebut dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi semakin naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011-2020 berfluktuasi cenderung menurun yang dimana pada tahun 2014 menjadi tertinggi yaitu sebesar 8,17% dan terendah pada tahun 2020 menurun menjadi 3,28% . Dengan rata-rata laju pertumbuhannya dalam 10 tahun tertulis adalah 5,56%.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik membahas penelitian yang berjudul **“Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB Perkapita Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Jambi tahun 2010-2020”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Rata-rata Perkembangan Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2010-2020 berfluktuasi dengan perkembangan 21,57%.
2. Rata-rata Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Jambi berfluktuasi dengan perkembangan rata-rata 1,34%.
3. Perkembangan PDRB Perkapita di Kota Jambi dalam 10 tahun terakhir berfluktuasi dengan rata-rata perkembangan 9,153%.
4. Rata - Rata Pertumbuhan Ekonomi ADHK di Kota Jambi dalam 10 tahun terakhir berfluktuasi dengan rata-rata perkembangan sebesar 5,56%.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan identifikasi masalah dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti oleh penulis :

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Jambi 2010-2020?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Jambi 2010-2020?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk, PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Jambi periode 2010-2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk, PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah Kota Jambi periode 2010-2020.

### 1.5 Manfaat Penelitian



Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Akademis

Secara teoritis bermanfaat bagi para ilmuwan dalam memperdalam pengetahuan factor yang mempengaruhi pajak daerah Kota Jambi

2. Praktis

Secara praktis bermanfaat bagi para pembil kebijakan dan pihak yang terkait, dan memerikan masukan kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam hal penyusunan kebijakan di bidang perekonomian maupun di bidang keuangan daerah.

## **BAB II LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ahmad Yani (2008:44), Pendapatan Hasil Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan setiap daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pemerintahan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan pendapatan sah lain-lainnya.

#### **2.1.1.1 Pajak Daerah**

##### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Dalam konteks daerah pajak daerah adalah pajak – pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah (misal provinsi, kabupaten, kotamadya) yang di atur berdasarkan peraturan daerah masing masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk rumahtangga daerahnya (Undang-Undang No 28 Tahun 2009).

Pajak daerah terbagi dua :

- a. Pajak provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi. Pajak provinsi saat ini menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang berlaku :
1. Pajak kendaraan bermotor
  2. Bea balik nama kendaraan bermotor
  3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  4. Pajak air permukaan
  5. Pajak rokok
- b. Pajak kabupaten dan kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten / kota. Pajak kabupaten dan kota saat ini menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang berlaku :
1. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
  2. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  3. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
  4. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
  5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

6. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
7. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
8. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
9. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
10. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
11. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

## 2. Kriteria Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutannya. Pajak umum (pajak pusat) yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pajak daerah yang memungutnya adalah Pemerintah Daerah. Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh K.J. Davey (1988) dalam bukunya *Financing Regional Government*, yang terdiri dari 4 (empat) hal yaitu :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturannya sendiri
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah
3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya diberikan kepada pemerintah daerah.

Dari kriteria pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak daerah tersebut terdiri dari pajak yang ditetapkan dan dipungut di wilayah daerah dan bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat. Pajak yang dipungut di wilayah daerah ini dikenal sebagai pajak daerah terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar



Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Sedangkan bagi hasil pajak terdiri dari PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Pajak daerah yang dibahas disini hanya pajak yang dipungut di wilayah daerah saja.

### 3. Pungutan Pajak

Disadari atau tidak pada hakekatnya pajak daerah merupakan pungutan yang dikenakan terhadap seluruh rakyat di suatu daerah. Segala bentuk pungutan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebenarnya merupakan pengurangan hak rakyat oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam pemungutannya tidak boleh diskriminatif dan harus diupayakan bersifat adil.

Dalam perpajakan keadilan haruslah obyektif dan dapat dirasakan merata oleh rakyat. Atas dasar pemikiran tersebut maka diperlukan landasan berpikir dalam melakukan pemungutan pajak. Landasan berpikir yang mendasari pemungutan pajak ini dikenal dengan asas pemungutan pajak. Asas saja tidaklah cukup, perlu justifikasi yang melandasi konsep berpikir yang rasional dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut, konsep inilah yang dikenal dengan teori pemungutan pajak.

### 4. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* bahwa dalam pemungutan pajak agar diupayakan adanya keadilan objektif. Artinya, asas pemungutan yang mendasarinya bersifat umum dan merata. Asas pemungutan pajak ini dikenal *The Four Maxims* atau *Smith's cannon*, yaitu :

- a. Equality, kesamaan dalam beban pajak, sesuai kemampuan wajib pajak.
- b. Certainty, dijalankan secara tegas, jelas dan pasti
- c. Convenience, tidak menekan wajib pajak, membayar pajak dengan senang dan rela
- d. Economy, biaya pemungutannya tidak lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya

a

## 5. Teori Pungutan Pajak

Seperti telah diuraikan sebelumnya, teori pemungutan pajak ini muncul untuk mencari dasar konseptual pemungutan pajak bagi Negara, sehingga secara teoritis pemungutan pajak yang dilakukan Negara itu dapat dibenarkan baik dipandang dari sisi yuridis maupun sisi ilmiah. Dengan kata lain bahwa, teori pemungutan pajak ada guna memberidarkan menyatakan keadilan (*justification*) kepada hak Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Berikut ini beberapa teori pemungutan pajak yang pernah ada atau yang masih digunakan sebagai dasar pemungutan pajak sampai sekarang.

- a. Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (bertanggung) kepada Negara (penanggung).

Kelemahan teori ini,

jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada pengganti dari Negara, kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.

b. Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini juga dikenal sebagai Benefit Approach Theory.

c. Teori Daya Pikul

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-masing. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai Ability to Pay Approach Theory.

d. Teori Bakti

Pajak ( kewajiban asli ) merupakan bukti tandabakti seseorang kepada negaranya.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat, bukan pada individu atau Negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan pajak.

## 6. Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan bergantung pada dua hal yaitu keadaan objek pajak dan kewenangan pungut. Keadaan objek pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang dibatasi oleh waktu atau periode. Keadaan objek pajak di masa lalu, dengan masa sekarang bisa sama, bisa juga berbeda. Karena sifat inilah, perlucara penafsiran keadaan objek pajak yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau mendekati yang sesungguhnya. Cara penafsiran keadaan objek ini lah yang dikenal pengakuan dan pengukuran objek pajak atau stelsel. Sedangkan kewenangan pungut dan cara menetapkan besarnya pungutan pajak inilah yang melahirkan sistem pemungutan pajak.

#### a. Dasar Pemungutan Pajak

Dasar pemungutan pajak ini merupakan bentuk operasional dari pengakuan dan pengukuran keadaan objek pajak atau stelsel. Berikut ini dasar pemungutan pajak yang dikenal dalam berbagai literatur perpajakan yaitu :

##### 1. Stelsel Nyata ( Rill Stelsel )

Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan objek yang sesungguhnya (rill atau nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun setelah keadaan sesungguhnya objek pajak diketahui.

Keunggulan stelsel ini sebagai dasar pemungutan pajak lebih realistis. Kelemahannya adalah stelsel ini,

pajak baru dapat dibayar atau dikenakan setelah akhir periode, yaitu ketika keadaan objek pajak secara riil telah diketahui.

## 2. Stelsel Anggapan ( Fictieve Stelsel )

Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan yang diatur oleh ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan yang diatur ini merupakan suatu asumsi atau anggapan yang ditetapkan oleh ketentuan atau peraturan. Misalnya, keadaan objek pajak tahun sekarang sama dengan keadaan objek tahun lalu, sehingga pajak tahun sekarang dapat dikenakan pada awal tahun keunggulan stelsel ini, pajak dapat dibayar selambat tahun sekarang, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya, pajak yang dikenakan atau dibayar tidak menggambarkan keadaan pajak yang sebenarnya.

## 3. Stelsel Campuran

Untuk mengatasi kelemahan masing-masing stelsel tersebut, maka dalam pelaksanaan pengenaan pajak dilakukan dengan dua cara. Di awal tahun, pajak yang dikenakan didasarkan pada keadaan objek pajak pada tahun lalu, dan di akhir tahun, pajak dikenakan berdasarkan keadaan sesungguhnya objek pajak. Karena pelaksanaannya demikian, maka stelsel ini disebut *Stelsel Campuran*. Jika pajak yang dibayar di awal tahun, maka terjadi kelebihan pajak.



Kelebihan pajak bayar ini dapat direstitusi

(kelebihannya dapat diminta kembali). Sebaliknya, jika akhira tahun yang lebih besar, maka wajib pajak yang bersangkutan melunasi kekurangannya

#### b. Sistem Pemungutan Pajak

Kewenangan pungut dan cara menetapkan besarnya pungutan pajak inilah yang melahirkan sistem pemungutan pajak. Berikut ini sistem pemungutan pajak yang dikenal dalam literatur perpajakan, yaitu :

##### 1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang mempercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada fiskus (pemerintah). Sistem ini meletakkan wajib pajak pada posisi yang lemah dan pasif, utang pajak timbul setelah terbitnya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem ini hanya cocok diterapkan pada masyarakat yang berpendidikan rendah dan tingkat kejujuran aparat pajak tinggi. Jika tidak, bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari aparat pajak dan korupsi.

##### 2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan tanggung jawab dan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan

melaporkan pajak yang terutang atau harus dibayar kepada diri pribadi wajib pajak sendiri.

Sistem ini hanya cocok diterapkan bagi masyarakat yang sudah maju dan iklim pajaknya sudah baik, *tax minded* yang tinggi, dan tingkat integritas masyarakatnya tinggi.

### 3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong, atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## 7. Tarif Pajak

Sebagaimana diuraikan dalam asas pemungutan pajak, bahwa pemungutan pajak dilakukan secara adil, artinya umum dan merata. Salah satu bentuk operasional penciptaan keadaan pemungutan pajak yang adil yaitu melalui tarif pajak. Namun demikian, penerapan tarif pajak di lapangan bergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh fiskus. Misalnya, untuk masyarakat yang penghasilannya tidak merata atau cenderung rendah, maka penerapan tarif pajak progresif – progresif lebih mencerminkan keadilan dibandingkan dengan tarif pajak lainnya.

Tarif pajak, merupakan alat ukur untuk menilai tingkatan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Secara Teoritis terdapat 4 macam tarif pajak, yaitu:

a. Tarif Proporsional

Tarif pajak yang persentasenya tetap dan tidak bergantung pada besarnya dasar pengenaan pajak.

b. Tarif Progresif

Tarif pajak yang persentasenya meningkat, sesuai besarnya (meningkatnya) dasar pengenaan pajak.

c. Tarif Degresif

Tarif pajak yang persentasenya menurun, sesuai meningkatnya dasar pengenaan pajaknya

d. Tarif Tetap

Jumlah atau angkanya tetap, tidak bergantung besarnya dasar pengenaan pajak

e. Utang Pajak

Secara umum, utang timbul karena adanya perikatan antar debitur dan kreditur. Namun, tidak demikian untuk utang pajak. Utang pajak timbul karena undang – undang atau peraturan yang ditetapkan oleh Negara. Ada dua konsep teori yang menjelaskan timbulnya utang pajak:

a. *Konsep Materiel*

Menurut konsep ini utang pajak timbul karena ada sebab – sebab yang mengakibatkan seorang dikenakan pajak. Artinya, utang pajak timbul karena dipenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, dalam bahasa Belanda disebut *tatsbestand*. Syarat-syarat tertentu tersebut berupa serangkaian perbuatan, keadaan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. Dengan demikian, menurut konsep ini utang pajak timbul tidak harus menunggu adanya surat ketetapan pajak.

*b. Konsep Formiel*

Menurut konsep ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan dari fiskus. Artinya, utang pajak timbul bila telah ada ketetapan dari fiskus. Artinya, utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan dari fiskus.

Meskipun dipenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, undang-undang tetap tidak ada surat ketetapan maka belum terutang pajak atau timbul utang pajak.

f. Penagihan Utang Pajak

Tindakan penagihan hutang pajak dapat dilakukan dengan 2 langkah:

- a. Penagihan secara pasif, pada umumnya dilakukan dengan Tambahan (SKPT) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dan terakhir menggunakan Surat Tegoran.

- b. Penagihan secara aktif yaitu penagihan dengan menggunakan Surat Paksa dan dilanjutkan dengan tindakan sita.

## 8. Berakhirnya Utang Pajak

Setiap perikatan, termasuk pula utang pajak pada waktunya akan berakhir, dan berakhirnya utang pajak jika terjadi hal-hal berikut ini:

### a. *Pembayaran*

Utang pajak yang melekat pada diri wajib pajak akan hapus dengan sendirinya jika telah ada pembayaran sejumlah pajak yang terutang. Pembayaran dapat dilakukan ke Kas Negara atau lembaga lain yang ditunjuk, misalnya Bank atau Kantor Pos dan Giro.

### b. *Kompensasi*

Jika jumlah pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak melebihi jumlah pajak yang terutang, maka timbul selisih lebih. Selisih lebih inilah yang dapat dikompensasikan dengan utang pajaknya. Kompensasi pajak ini dapat dibedakan menjadi dua:

#### 1. *Kompensasi*

*Horizontal*, adalah pengalihan kelebihan pembayaran yang sama pada tahun berikutnya.

#### 2. *Kompensasi Vertikal*,

adalah pengalihan kelebihan pembayaran suatu jenis pajak pada

tahun tertentu dengan utang pajak jenis yang lain pada tahun yang sama.

*c. Daluwarsa*

Terjadi jika waktu penagihan utang pajak telah lewat waktu yang sudah ditentukan, akibatnya utang pajak tersebut tidak dapat ditagih oleh fiskus dan dianggap lunas. Penentuan batas waktu penagihan utang pajak ini merupakan salah satu bentuk kepastian hukum dalam undang-undang perpajakan.

*d. Pembebasan*

Jika utang pajak berakhir dengan tidak semestinya, tetapi karena tidak diadakan oleh fiskus, maka utang pajak ini disebut dibebaskan. Pada umumnya pembebasan tidak diberikan terhadap pokok pajak tetapi terhadap sanksi administrasi perpajakannya.

*e. Penghapusan*

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan hanya saja penghapusan ini diberikan karena keadaan pribadi wajib pajak, misalnya bangkrut atau pailit.

## **2.1.2 Jumlah Penduduk**

Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan dengan tujuan untuk menetap (BPS, 2014 : 102). Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Tetap lebih menekankan pada efisiensi mereka. Peningkatan GNP perkapita yang berkaitan erat dengan perkembangan sumber daya manusia yang dapat menciptakan efisiensi dan peningkatan produktivitas di kalangan buruh. Pembentukan model manusia yaitu, proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seluruh penduduk negara yang bersangkutan.

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan – kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh empat komponen, yaitu : kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), migrasi masuk, dan migrasi keluar ( Subri, 2003 :16).

Peningkatan populasi ditentukan oleh peningkatan tingkat kelahiran, penurunan tingkat kematian, dan kelebihan migrasi terhadap emigrasi. Tingkat kelahiran dan tingkat kematian bisa diukur dalam jumlah kelahiran atau kematian per seribu jiwa. Tingkat kematian diukur dengan konsep harapan hidup (panjang usia) yang dihitung sejak seorang bayi dilahirkan. Di negara – negara dengan pendapatan yang rendah proses kenaikan dalam harapan hidup jauh lebih cepat, dan pertumbuhan populasi di negara berkembang disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian yang relative tidak turunny tingkat kelahiran (Hakim,

2004 : 151). Penduduk yang meningkatkan setiap tahunnya akan menimbulkan dampak positif dan negatif :

1). Dampak positif, penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja yang dapat meningkatkan produksi.

Apabila pertumbuhan ini diimbangi dengan pendidikan, latihan, dan pengalaman kerja yang kemahiran penduduk.

Pertambahan produksi akan lebih cepat daripada pertambahan tenaga kerja.

Pertambahan penduduk akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

2). Dampak negative, suatu negara dikatakan menghadapi masalah kelebihan penduduk apabila jumlah penduduk jauh lebih besar dibandingkan dengan faktor-faktor produksi yang tersedia.

Akibatnya produksi marjinal penduduk rendah. Dengan demikian, penduduk yang berlebihan akan menimbulkan kemerosotan kemakmuran masyarakat (Poli, 2002 : 322).

Menurut Todaro (2000:525) mengemukakan bahwa cepatnya pertumbuhan penduduk di Negara-negara ketiga telah menyusutkan persediaan tanah, air, dan bahan bakar kayu di daerah pedesaan serta menimbulkan masalah krisis kesehatan di daerah perkotaan. Selain itu, lonjakan penduduk juga mengakibatkan degradasi lingkungan ataupun pengikisan sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas.

Jumlah penduduk menurut teori Hansen mengenai stagnansi (secular stagnation) dalam devas (1989) yang



menerangkan bahwa bertambahnya penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan negatif terutama investasi.

### 1. Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Jumlah penduduk merupakan variabel yang berpengaruh besar dalam hasil produksi dan jasa. Menurut Arianto (2014) menjelaskan pengujiannya jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan sebagai subjek pajak akan mengeluarkan penghasilannya untuk membayar pungutan pajak.

#### 2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto

Widodo (2006), menyatakan bahwa indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah adalah suatu periode tertentu ditentukan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB

atah harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada suatu waktu tertentu sebagai harga dasar.

Teori Neo-Klasik menjelaskan bahwa untuk membangunkan kinerja perekonomian suatu Negara maka dibutuhkan akumulasi kapital (Kuncoro, 2000). Negara berkembang lebih memerlukan investasi terutama asing karena pada umumnya tingkat tabungan domestic rendah. Investasi asing dapat berperan sebagai medium transfer kebutuhan akan sumberdaya seperti teknologi, kemampuan manajerial, alureksport, dan modal dari Negara-negara industri ke Negara-negara berkembang, oleh karena itu, investasi akan meningkatkan produktivitas dan terkait pula dengan pertumbuhan ekonomi. Teori ekonomi menjelaskan investasi mengarah kepada simulasi modal yang bisa meningkatkan output potensial Negara dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Samuelson, 2003). Teori neo-klasik menjelaskan bahwa untuk membangunkan kinerja perekonomian suatu Negara maka dibutuhkan akumulasi kapital (Kuncoro, 2000).

Investasi terkait masa pertumbuhan ekonomi. Teori ekonomi menjelaskan investasi mengarah kepada akumulasi modal yang bisa meningkatkan output potensial Negara dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Samuelson, 2003).

Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di

suatudaerahdalamkuatuperiodetertentu,

baikatasdasarhargaberlakumaupunatasdasarhargainstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh perekonomian pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDRB

menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung PDRB (Perubahan Indeks Implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. Perhitungan Produk Domestik Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan.

#### 1. Pendekatan produksi:

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh

berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalan, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, real estate, dan jasa perusahaan, (9) jasa jasa (termasuk jasa pemerintah).

2. Pendekatan pengeluaran:

Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori dan (5) ekspor netto (merupakan ekspor dikurangi impor).

3. Pendekatan pendapatan:

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikutserta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewatanah, bunga modal dan keuntungan;

semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

PDRB menurut lapangan usaha dikelompokkan dalam 9 sektor ekonomis sesuai dengan international standard industrial classification of All Economic Activities (ISIC) sebagai berikut:

1. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan
  - a. Subsektor tanaman bahan makanan.
  - b. Subsektor tanaman perkebunan.
  - c. Subsektor peternakan
  - d. Subsektor kehutanan
  - e. Subsektor perikanan
2. Sektor pertambangan dan penggalian.
  - a. Subsektor pertambangan minyak dan gas bumi.
  - b. Subsektor pertambangan bukan migas
  - c. Sektor penggalian
3. Sektor industri pengolahan.
  - a. Subsektor industri migas
    - Pengilangan minyak bumi
    - Gas alam cair (LNG).

- b. Subsektor industri bukanmigas
- 4. Sektor listrik, gas, dan air bersih
  - a. Subsektor listrik
  - b. Subsektor gas
  - c. Subsektor air bersih
- 5. Sektor konstruksi
- 6. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran
  - a. Subsektor perdagangan besar dan eceran
  - b. Subsektor hotel
  - c. Subsektor restoran
- 7. Sektor pengangkutan dan komunikasi
  - a. Subsektor pengangkutan
    - Angkutan rel
    - Angkutan jalan raya
    - Angkutan laut
    - Angkutan sungai, danau, dan penyebrangan
    - Angkutan udara
    - Jasa penunjang angkutan
  - b. Subsektor komunikasi
- 8. Sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan
  - a. Subsektor bank
  - b. Subsektor lembaga keuangan tanpa bank

- c. Subsektor jasa penunjang keuangan
  - d. Subsektor real estate
  - e. Subsektor jasa perusahaan.
9. Jasa-jasa
- a. Subsektor pemerintahan umum
  - b. Subsektor swasta
    - Jasa sosial kemasyarakatan
    - Jasa hiburan dan rekreasi
    - Jasa perorangan dan rumah tangga

a. Pengaruh PDRB terhadap Permintaan Pajak Daerah

Dengan meningkatnya PDRB maka akan semakin tinggi pula ekonomi daerah tersebut dan bias membayar pajak dengan tertib dan memungkinkan daerah untuk mewajibkan pajak yang lebih tinggi dari sebelumnya. Menurut Hariyuda (2009) menjelaskan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Dalam teori pertumbuhan mereka, dimisalkan luasan tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan

**2.1.3.1 Pendapatan Per kapita**

Penduduk dan pendapatan per kapita. Pengaruh pertumbuhan penduduk pada pendapatan per-kapita biasanya tidak menguntungkan. Pertumbuhan penduduk pada

pendapatan per-kapita dalam tiga cara: (i) ia mempererat beban penduduk pada lahan; (ii) ia menaikan biaya barang konsumsi karena kekurangan factor pendukung untuk menaikan penawaran mereka; (iii) memerosotkan akumulasi modal, karena dengan bertambahnya jumlah penduduk, biaya meningkat. Pengaruh buruk ini semakin menjadi parah jika persentase anak-anak pada keseluruhan penduduk tinggi, sebagaimana terjadi di semua Negara terbelakang.

Setiap kenaikan output nasional diringi oleh jumlah konsumen yang semakin besar. Besarnya jumlah anak-anak di antara penduduk membawa beban berat pada perekonomian, karena anak-anak hanya menghabiskan dan tidak menambah produksi nasional. Faktor lain adalah harapan hidup yang pendek. Itu berarti bahwa jumlah anak yang menjadi tanggungan keluarga lebih besar daripada jumlah mereka yang menghasilkan sehingga pendapatan per kapita menjadi rendah. Jadi dampak pertumbuhan penduduk adalah menurunkan pendapatan per kapita.

#### **2.1.4 Pertumbuhan ekonomi**

Prof. Simon Kuznetz (Jhingan, 2004:57) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangkauan jang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya.

Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.



Definisi ini memiliki tiga komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kependuduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

#### **2.1.4.1 Ukuran Pertumbuhan Ekonomi**

Suparmoko (2009.:205)

memandang bahwa untuk mengetahui maju tidaknya suatu perekonomian di perlukan suatu alat pengukur yang tepat. Ada beberapa macam alat pengukur pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah:

a) **Produk Domestik Bruto (PDB)**

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, padahal sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan.

b) **Produk Domestik Bruto Per kapita/Pendapatan Per kapita**

Produk domestik bruto per kapita dapat dipakai sebagai proxy pendapatan per kapita dan lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara dibandingkan PDB saja. PDB per kapita adalah jumlah PDB nasional dibagi dengan jumlah penduduk, atau dapat disebut sebagai PDB rata-rata atau PDB per kepala. Bank Dunia menggunakan angka produk nasional bruto (PNB) dan bukan PDB dalam mengukur perkembangan ekonomi suatu negara yaitu dengan memperhitungkan pendapatan bersih dari faktor produksi milik orang asing. Walaupun PDB maupun PNB per kapita merupakan alat pengukur yang lebih baik, namun tetap belum mencerminkan kesejahteraan penduduk secara tepat. Hal ini karena PDB rata-rata itu tidak mencerminkan kesejahteraan ekonomi yang sesungguhnya dirasakan oleh setiap orang di suatu negara. Dapat saja angka rata-rata itu tinggi, tetapi sesungguhnya ada orang atau sekelompok orang yang tidak menerima pendapatan sama sekali. Oleh karena itu perlu diperhatikan unsur distribusi pendapatan di antara penduduk suatu negara.

Dengan memperhatikan unsur distribusi pendapatan ini, maka PDB atau PNB per kapita yang tinggi yang disertai dengan distribusi pendapatan yang lebih merata akan mencerminkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik daripada bila pendapatan per kapita yang tinggi tetapi ada distribusi pendapatan yang tidak merata. Namun demikian pendapatan per kapita atau PDB per kapita atau PNB per kapita tetap merupakan alat pengukur yang unggul dibandingkan alat pengukur yang lain.

c) Pendapatan Per Jam Kerja

Pendapatan per jam kerjanya sebenarnya paling baik dipakai sebagai alat pengukur untuk mengukur maju tidaknya suatu perekonomian.

Biasanya suatu negara yang mempunyai tingkat pendapatan atau tingkat upah per jam kerja lebih tinggi dari pada upah per jam kerja di negara lain untuk jenis pekerjaan yang sama, pasti boleh dikatakan bahwa negara yang bersangkutan lebih maju.

d) Harapan Hidup Waktu Lahir

Harapan hidup waktu lahir juga dapat dipakai untuk melihat kemajuan dan kesejahteraan suatu perekonomian. Kesejahteraan benar-

benar dapat dirasakan bila seseorang dapat memenuhi segala macam kebutuhannya seperti kebutuhan akan barang dan jasa termasuk kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, dan dalam jangka waktu yang lama yaitu bila dia karunia umur yang lama. Tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi, orang akan mampu memperoleh kualitas hidup yang baik yang meliputi kondisi makanan, perumahan, sandang, rekreasi, dan sebagainya. Dengan demikian tingkat kesehatan akan tinggi pula dan umur rata-rata akan menjadi panjang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian. Kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek (Ahmad Ma'aruf. 2008 : 46)

Menurut Todaro (Ahmad Ma'aruf. 2008 : 46) di dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terdapat tiga komponen penentu utamanya:

- a. akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia;
- b. pertumbuhan penduduk yang meningkatkan jumlah angkatan kerja di tahun-tahun mendatang;
- c. kemajuan teknologi. Menurut Kuznets pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri terjadi oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak Sukirno 1994 (Eko Wicaksono Pambudi. 2013 : 1 ).

Ada enam ciri proses pertumbuhan ekonomi seperti yang dikemukakan Kuznets (AndiestaFebrianPribadi, 2015 : 16), yaitu:

- (1). Tingkat pertumbuhan *output* per kapita dan penambahan penduduk yang tinggi.
- (2). Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi, khususnya produktivitas tenaga kerja.
- (3). Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
- (4). Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
- (5). Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha menambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku.
- (6). Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencakup sepertiga bagian penduduk dunia.

Teori pertumbuhan baru (*New Growth Theory*) memberikan kerangka teoretis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membangun perekonomian. (AndiestaFebrianPribadi, 2015 : 16)

## **2.1.5 Hubungan antar Variabel**

### **a. Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Pajak Daerah**

Menurut anata penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis republik indonesia selama 6 bulan dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap, baik yang produktif atau tidak produktif (dalam susanto, 2014:3). Adanya aktifitas penduduk dalam suatu perekonomian akan berpengaruh terhadap pendapatan suatu daerah yang berupa pajak, retribusi dan lain sebagainya. Sehingga apabila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang diterima juga akan meningkat karena penduduk serta adanya jumlah penduduk yang produktif didalam perekonomian (Norfridwitya dalam susanto, 2014:3).

Dengan demikian dapat dikatakan merupakan subjek atau pengaruh pergerakan perekonomian dalam suatu daerah. Sehingga apabila jumlah penduduk meningkat maka aktifitas perekonomian suatu daerah juga akan meningkat dan hal tersebut tentunya akan berdampak positif pada penerimaan pajak daerah. Hal tersebut sama halnya dengan penelitian Susanto (2014:12) yang menyimpulkan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang positif terhadap PAD dimana pajak daerah merupakan sub – sektor PAD.

### **b. Hubungan PDRB Perkapita Terhadap Pajak Daerah**

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu daerah. Apabila aktifitas perekonomian meningkat maka hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Menurut Miyasto (2003) semakin meningkatnya pendapatan, jumlah kekayaan, dan besarnya pengeluaran konsumsi seseorang maka semakin tinggi tingkat kemampuan orang ( wajib pajak ) dalam membayar pajak. Seperti halnya penelitian supriadi (2009 : 533) menjelaskan bahwa setiap adanya peningkatan PDRB berpengaruh positif terhadap pajak daerah.

### **c. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pajak Daerah**

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal ini menyebabkan perputaran perekonomian yang baik dan positif. Mengarah kepada pendapatan masyarakat yang tentunya meningkatkan kemampuan seseorang dalam membayar pajak ( Sasana, 2005 : 24). Seperti halnya penelitian Seperti halnya penelitian supriadi (2009 : 533) menjelaskan bahwa setiap adanya peningkatan Pertumbuhan Eonomi berpengaruh positif terhadap pajak daerah.

#### **2.1.6 Penelitian Terdahulu**

Adapun literatur-literatur yang dapat menjadi referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

No.	Peneliti	Variabel	Hasil
1	Daisy, dkk .2018 .jurnal . Analisisfaktor – faktor yang mempengaruhi penerimaanpajakdaerah pada pemerintahprovin si Sulawesi Utara. Vol 19, No.2.	Jumlahpenduduk, inflasi , PDRB dan pajakdaerah	Hasil penelitanjumlahpendudukberpengaruh positif dan signifikanterhadap penerimaanpajakdaerah. PDRB berpengaruhpositifterhadap penerimaanpajakdaerah. Inflasiberpengaruh positif dan signifikanterhadap pemerintahpajakdaerah.



2	<p>Nadya , . 2018 . jurnal . Analisisfaktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota Tegal, Vol 18, No.2.</p>	<p>Pajak daerah, wajib pajak, pendapatan per kapita, inflasi, pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan wajib pajak, pendapatan per kapita, dan pertumbuhan ekonomi Kota Tegal dari tahun 1991 sampai 2010 mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal, sedangkan pengaruh inflasi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal.</p>
3	<p>Alfian .2010 . jurnal . Analisisfaktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta ( tahun 1994-2007) Vol 18, No.2.</p>	<p>Pajak daerah, produk domestik regional bruto( PDRB ), inflasi, dan jumlah penduduk .</p>	<p>Melihat hasil analisis data ini, maka disarankan kepada pemerintah kota Surakarta, mengingat penerimaan dari pos pajak daerah memberikan kontribusi yang terbesar terhadap total penerimaan PAD Kota Surakarta, maka diharapkan pemerintah Kota Surakarta perlu menambah jenis obyek pajak daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan untuk pos pajak daerah Kota Surakarta. Namun upaya untuk meningkatkan pajak daerah perlu dilakukan dengan bijaksana, agar tidak semakin membebani masyarakat. Selain itu, dalam meningkatkan pajak daerah disarankan kepada pemerintah Kota Surakarta, alangkah sebaiknya sebelum melakukan pemungutan pajak daerah dilakukan terlebih dahulu sosialisasi dan pendataan obyek pajak daerah agar pada saat proses pemungutan pajak daerah tersebut seluruh wajib pajak dapat ditarik kewajiban membayar pajaknya.</p>

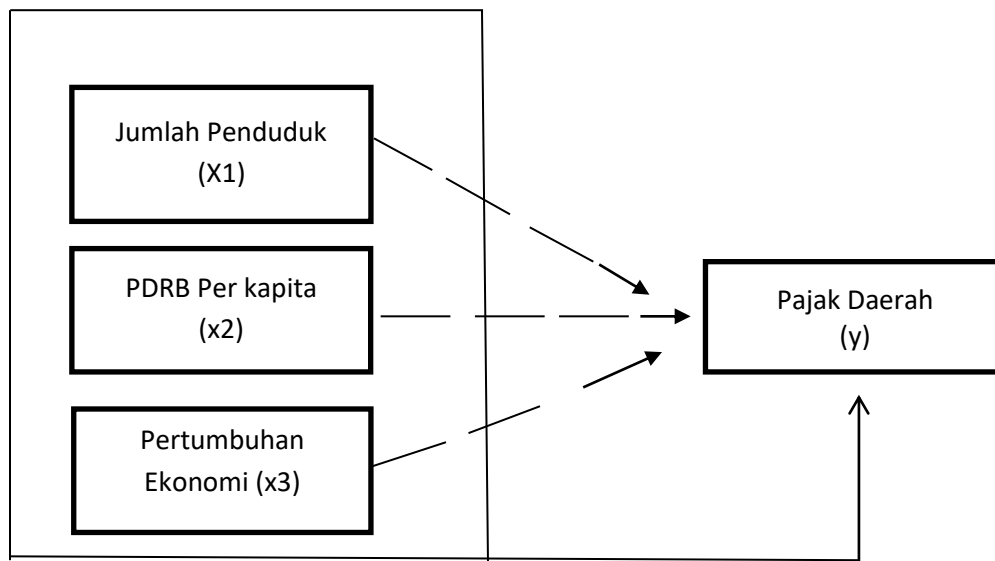
4	Retnaningtyas,dkk . 2013 .jurnal . Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan. Vol 10, No.2.	Kesadaran wajib pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi terhadap kualitas pelayanan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang dimiliki wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka akan meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak daerah kota Tarakan. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan persepsi terhadap kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah kota Tarakan. Selain itu, tingkat efektif, sedangkan tingkat kontribusi pajak daerah belum memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.
5	Daisy ,dkk . 2018 .jurnal . analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah pada pemerintah provinsi Sulawesi Utara Vol 22, No.2.	Jumlah penduduk, PDRB, inflasi dan pajak daerah.	Hasil penelitian jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

### 2.1.7 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas ( Jumlah penduduk, PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi) yang mempengaruhi Pajak Daerah, dimana mencari pengaruh secara parsial ataupun simultan pada variabel Jumlah

penduduk, PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi untuk mengetahui berapa besar pengaruh terhadap variabel Pajak Daerah, Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas alur pemikiran dalam penelitian ini. ( Rumusi : 2012 : 3 ).

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**



Keterangan :

- Garis Putus – Putus: Parsial
- Garis Tidak Lurus : Simultan

### 2.1.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu persoalan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya dan harus bersifat logis, jelas dan dapat di uji.

1. Jumlah penduduk, PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomis secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020
2. Jumlah penduduk, PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomis secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Jambi tahun 2010-2020

## **2.2 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan kuantitatif.

Menurut Suyyoto (2013:26), analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan rumus-rumus statistik yang disesuaikan dengan judul penelitian dan rumusan masalah, untuk perhitungan angka-angka dalam menganalisis data yang diperoleh.

### **2.2.1 Jenis dan Sumber Data**

Data dapat diartikan sebagai keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan (Sugiyono, 2016:137). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, Berupa data sekunder Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : (Syech, 2011:75)

#### **1. Data Primer.**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan merupakan data yang didapat dari catatan, buku, majalah, laporan keuangan publikasi, artikel, buku-buku sebagai teori dan lain-lain.

### **2.2.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka dari berbagai literatur, artikel, internet atau buku-buku yang berkaitan dengan berbagai sumber-sumber lain. Penelitian ini menggunakan data sekunder. data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari data (BPS Provinsi Jambi).

Guna untuk mendapatkan data dari variabel yang digunakan. dimana variabel independen yang dibagi menjadi tiga unsur yaitu, ( $X_1$ ) Jumlah Penduduk, ( $X_2$ ) PDRB Perkapita, ( $X_3$ ) Pertumbuhan Ekonomi dan variabel dependen ( $Y$ ) Pajak Daerah.

### **2.2.3 Alat Analisis**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif digunakan dalam upaya menganalisis pengaruh Jumlah penduduk, PDRB Perkapita dan Pertumbuhan ekonomi terhadap pajak daerah.

### 2.2.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda adalah regresi di mana variabel variabel terikat (Y) yang dihubungkan/dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin dua, tiga dan seterusnya variabel bebas ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) (Teguh, Muhammad. 2010). Dimana persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a_0 + a_1 X_1 + a_2 X_2 + a_3 X_3 + e$$

Kemudian untuk menghasilkan persamaan Satuan Variabel maka di rubah menggunakan Ln.

$$\ln Y = a + b_1 \ln X_1 + b_2 \ln X_2 + b_3 \ln X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Variabel Terikat (Pajak Daerah)
- a : Konstanta
- b : Koefisien
- $X_1$  : Jumlah Penduduk
- $X_2$  : PDRB Perkapita
- $X_3$  : Pertumbuhan Ekonomi
- e : Kesalahan Pengganggu (*Error tern*)

### 2.2.4 Uji Asumsi Klasik

Prasyarat analisis data adalah sesuatu yang dikenakan pada sekelompok data hasil observasi atau penelitian untuk mengetahui layak atau tidak layak nya data

tersebut untuk dianalisis dengan menggunakan teknik statistik.

Apabila prasyarat analisis tidak terpenuhi,

maka aplikasi teknik statistik menjadi tidak layak untuk menganalisis data tersebut. Akan tetapi, apabila tetap dipaksakan untuk menganalisis data tersebut dengan teknik statistik maka hasil penelitian tersebut menjadi bias dan memberik kesimpulan yang salah (Misbahuddin dan Hasan 2013 :277). Uji persyaratan pada regresi linier ganda biasa disebut dengan istilah uji asumsi klasik (Sudarmanto 2005:101) dalam melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik regresi linier ganda diperlukan persyaratan asumsi klasik yang dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Uji Normalitas**

Menurut Sarjono dan Julianti (2011:53) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Pengujian untuk mendeteksi normalitas data dapat melalui analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik dapat dilakukan dengan cara menganalisis plot grafik histogram dan normal probability plot. Pada plot grafik histogram data dapat dikatakan normal jika tidak menceng ke kiri atau ke kanan, sedangkan untuk normal probability plot data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal (Ghozali dalam Frelitayani, 2010).

### **2. Uji Heterokedastisitas**

Sarjono dan Julianti (2011:53) uji



heterokedatisitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan.

Apabila asumsi tidak terjadi heterokedatisitas ini tidak terpenuhi, maka penaksir tidak lagi menjadi efisien baik dalam sampel kecil maupun besar dan estimasi koefisien dapat dikatakan menjadi kurang akurat.

Menurut Wijaya dalam Sarjono dan Julianita (2013:66) heterokedatisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan/observasi. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedatisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi homokedatisitas dalam model, atau dengan perkataan lain tidak terjadi heterokedatisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedatisitas, yaitu dengan melihat scatterplot yaitu dengan melihat titik yang menyebar secara acak di bagian atas angka 0 dan di bagian bawah angka 0 dari sumbu vertikal atau sumbu Y.

### **3. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel bebas memiliki masalah multikolinieritas (gejala multikolinieritas) atau tidak. Multikolinieritas adalah kolinieritas yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan antar variabel bebas (Sarjono dan Julianita 2013 :70).

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas, sebagai berikut:

1. Nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model

regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak yang tidak signifikan memengaruhi variabel terikat.

2. Menganalisis korelasi antar variabel bebas. Jika di antara variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (lebih besar daripada 0,90), hal ini mengindikasikan adanya multikolinieritas.
3. Multikolinieritas juga dapat dilihat dari nilai VIF (*variance-inflating faktor*). Jika  $VIF < 10$ , tingkat kolinearitas dapat ditoleransi.
4. Nilai *Eigenvalue* sejumlah satu atau lebih variabel bebas yang mendekati nol memberikan petunjuk adanya multikolinieritas.

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji

autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t$  sebelumnya pada model regresi yang dipergunakan. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Dalam model regresi yang baik adalah tidak terjadi autokorelasi (Nisfiannoor, 2009:92). Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Durbin Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

$d < dL$  Terdapat autokorelasi positif

$d > d_U$  Tidak ada autokorelasi positif atau

negatif

$d_L \leq d \leq d_U$  Daerah keraguan

$d > 4 - d_L$  Terdapat autokorelasi positif

$d < 4 - d_U$  Tidak ada autokorelasi positif atau

negatif

$4 - d_L \leq d \leq 4 - d_U$  Daerah keraguan

### 2.2.5 Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )

Koefisien Determinasi (Uji  $R^2$ )

digunakan untuk menunjukkan seberapa besar presentase variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dengan baik. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0-1 ( $0 < R^2 < 1$ ).

Ketentuan:

1. Apabila nilai  $R^2$  mendekati 0 (nol)

menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen/bebas dalam menjelaskan variabel dependen terbatas atau lemah

2. Apabila nilai  $R^2$  mendekati 1 (satu)

menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen/bebas dapat menjelaskan variabel dependen dengan sempurna atau baik.

### 2.2.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan prosedur yang berisi sekumpulan aturan yang menuju kepada suatu keputusan apakah akan menerima atau menolak hipotesis mengenai

parameter yang telah dirumuskan sebelumnya (Budiyono, 2015:141). Hipotesis yang dirumuskan adalah hipotesis nol (*null hypothesis*) dan hipotesis alternatif (*alternative hypothesis*). Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau tidak adanya korelasi (hubungan). Sebaliknya, hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan atau adanya korelasi. Hipotesis nol dilambangkan dengan  $H_0$ . Hipotesis alternatif dilambangkan dengan  $H_A$ . Penolakan hipotesis nol mengakibatkan penerimaan hipotesis alternatif, dan sebaliknya penerimaan hipotesis nol mengakibatkan penolakan hipotesis alternatif (Budiyono, 2015:143). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji F dan Uji T, bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas ( $X_1$ ) Jumlah Penduduk, ( $X_2$ ) PDRB Perkapita, ( $X_3$ ) Pertumbuhan Ekonomi dan variabel terikat ( $Y$ ) Pajak Daerah.

#### 1. Uji F (Simultan)

Digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependent. Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003).

-  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ , Jumlah penduduk, PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomis secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

-  $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ , Jumlah penduduk, PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomis secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Rumus yang digunakan dalam uji F ini adalah sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2(K-2)}{(1-R)(N-K+1)}$$

Dimana :

$R^2$  = koefisien determinasi

$N$  = jumlah observasi

$K$  = jumlah variabel

Sedangkan kriteria pengujianya adalah sebagai berikut :

1. Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
2. Apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

## 2. Uji t (Parsial)

digunakan untuk menunjukkan apakah independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap dependen. Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut (Gujarti, 2003) :

-  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$  , jumlah penduduk, PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

-  $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ , jumlah penduduk, PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Dalam pengujian hipotesis dengan uji-t digunakan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{\beta_i}{se(\beta_i)}$$

dimana :

$\beta_i$  = koefisien regresi

$se(\beta_i)$  = standart error koefisien regresi

Sedangkan kriteria pengujinya adalah sebagai berikut:

Sedangkan kriteria pengujinya adalah sebagai berikut :

1. Apabila  $t_{hitung} > t_{statistik}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
2. Apabila  $t_{hitung} < t_{statistik}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

### 2.2.7 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang diberikan kepada variabel penelitian dengan memberikan arti/menspesifikasikan kegiatan atau dengan memberikan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

### Operasional Variabel

Variabel	Nama Variabel	Definisi Operasional	Satuan	Skala
X1	Jumlah Penduduk	Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.	Jiwa	Rasio
X2	PDRB Perkapita	Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu Negara, yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu Negara dengan jumlah penduduk.	Rupiah	Rasio
X3	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan hasil per kapita dalam jangka panjang yang terjadi ketika adanya peningkatan sumber yang berasal dari proses intern perekonomian itu sendiri dan memiliki sifat sementara.	Persen	Rasio
Y	Pajak daerah	Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan	Rupiah	Rasio

		digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.		
--	--	---	--	--

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

##### **3.1 Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi**



Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi (BPPRD) merupakan bagian dari perangkat kerja Daerah yang berada di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Dahulu BPPRD Kota Jambi dikenal sebagai Dinas Pendapatan, berdiri sejak Tahun 1978, pada masa itu bernama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi yang keberadaannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Jambi Nomor 16 Tahun 1978. Dinas Pendapatan Kota Jambi pernah diubah menjadi Dinas Pelayanan Pajak dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang perubahan pembentukan organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi, yang semula nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Jambi yang disingkat DISYANJAK. Sejalan dengan adanya tekanan kenaikan volume serta bagian cakupan kerja, serta dengan di terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mewajibkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah, sehingga Dinas Pendapatan Kota Jambi berubah tata namanya menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.

### 3.2 Keadaan geografis

Kota Jambi merupakan Ibukota provinsi Jambi yang lebih dikenal dengan sebutan “Tanah Pilih Pusako Batuah”. Wilayah kota Jambi dikelilingi oleh wilayah kabupaten Muaro Jambi, baik dari arah utara, selatan, barat, maupun timur. Luas kota Jambi 205,38 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari :

No	kecamatan Kota Jambi	Luas	Presentase (%)
1	Kota Baru	36,11 Km <sup>2</sup>	17,56
2	Jambi Selatan	11,41 Km <sup>2</sup>	5,55
3	Jelutung	7,92 Km <sup>2</sup>	3,85
4	Pasar Jambi	4,02 Km <sup>2</sup>	1,96
5	Telaniapura	22,51 Km <sup>2</sup>	10,95
6	Danau Teluk	15,7 Km <sup>2</sup>	7,64
7	Pelayangan	15,29 Km <sup>2</sup>	7,44
8	Jambi Timur	15,94 Km <sup>2</sup>	7,75
9	Alam Barajo	41,67 Km <sup>2</sup>	20,27
10	Paal Merah	27,13 Km <sup>2</sup>	13,20
11	Danau Sipin	7,88 Km <sup>2</sup>	3,83

*Sumber : Jambi Dalam Angka 2020*

Namun, di awal tahun 2020, terjadi pemekaran 3 kecamatan baru di kota Jambi. Kecamatan baru tersebut adalah kecamatan Danau Sipin yang merupakan pemekaran dari kecamatan Telaniapura, meliputi kelurahan Solok Sipin, Murnisunga Putri, Selamat dan Legok, Kecamatan Paal Merah pemekaran dari kecamatan Jambi Selatan, meliputi kelurahan Lingkar Selatan, Paal Merah, dan Talang Bakung: dan kecamatan Alam Barajo yang

merupakan pemecahan dari kecamatan Kotabaru, meliputi kelurahan kenalibesar, Rawasari, Mayang, dan baganpete.

Secara geografis wilayah, Kota Jambi terletak di antara 103.30.1,67 bujur timur sampai 103.40.0.22 bujur timur, dan 01.30.2.98 lintang selatan sampai 01.40.1.07 lintang selatan. Posisi yang strategis secara geografis ini akan menjadi salah satu modal untuk pengembangan ekonomi di Kota Jambi. Apalagi jika didukung dengan posisi Jambi yang merupakan kota segitiga emas dari Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Sehingga semakin menguatkan tentang posisi strategis Kota Jambi. Posisi Kota Jambi yang strategis ini sudah barang tentu akan menjadikan Kota Jambi berada di jalur lintas perdagangan dan industri, baik pada skala maupun lintas beberapa negara ASEAN.

Geografi wilayah Kota Jambi secara keseluruhan terdiri atas datar dan dengan luas 20,538 HA atau 205,38 km<sup>2</sup>. Topografi wilayah Kota Jambi terdiri dari bagian besar datar (0-2%), bergelombang (2-15%) dan sedikit curam (15-40%) dengan luas kemiringan lahan masing-masing sebagai berikut :

1. Datar (1-2%) = 11.326 Ha
2. Bergelombang (2-15%) = 8.081 Ha
3. Curam (15-40%) = 41 Ha

Wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian dengan kisaran 10-60 m dari permukaan laut.

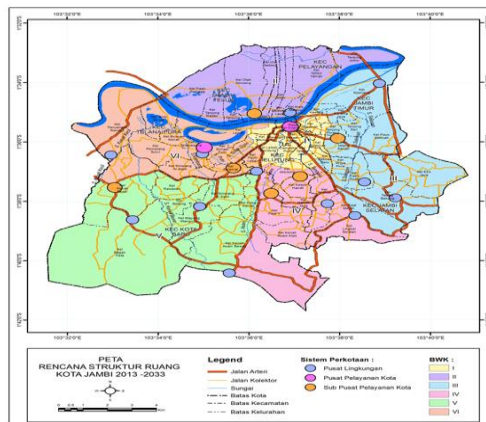
Berdasarkan kecamatan, sebagian besar wilayah kecamatan Pasar Jambi, Pelayangan, dan Dandau Teluk berada pada ketinggian 0-10 meter dari permukaan laut,

sedangkan wilayah kecamatan telanaipura, jambiselatan, jambitimidur, dan kotabaru sebagian besar berada pada ketinggian 10-40 meter dari permukaan laut.

Pemanfaatan lahan di kota Jambi didominasi oleh kebun dengan persentase sebesar 19.31% dari total luas kota Jambi. Selain itu, kota Jambi memiliki hutan yang cukup luas yaitu sebesar 17.19% dari total luas kota Jambi. Hal ini mengisyaratkan bahwa kota Jambi masih memiliki peluang untuk dikembangkan karena ketersediaan lahan yang cenderung masih luas, tetapi tentu saja harus ditelusuri kembali lahan-lahan yang potensial untuk dikembangkan, hutan misalnya, apakah termasuk lindung dan budidaya. Isupenyediaan RTH sebesar minimal mencapai 30% belum lagi digunakan lain dengan fungsi RTH yaitu ladang, belukar, sawah, dan sebagainya. Guna lahan lain yang mendominasi adalah pemukiman dengan persentase sebesar 16.11% dari total luas kota Jambi.

**Gambar 3.1**

**Peta Wilayah Kota Jambi**



### 3.3 Demografi

Perkembangan penduduk kota jambi selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dari 571,062 jiwa pada tahun 2014, meningkat menjadi 598,103 jiwa pada tahun 2018. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

**Tabel 3.1**

**Jumlah Penduduk Kota Jambi Tahun 2016 – 2020**

<b>Penduduk</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Laki-laki	285,492	289,713	293,217	297,036	300,566
Perempuan	285,570	286,354	286,354	294,098	297,537
Jumlah	571,062	576,067	579,571	591,134	598,103

*Sumber : Jambi Dalam Angka (berbagai tahun)*

Semakin meningkatnya jumlah penduduk kota jambi berimplikasi pada semakin padatnya wilayah yang ada di jambi, kepadatan per KM<sup>2</sup> menurut kecamatan pada tahun 2015. sebagai berikut :

1. Kecamatan kota baru = 2.109 jiwa/km<sup>2</sup>
2. Kecamatan jambiselatan = 3.978 jiwa/Km<sup>2</sup>
3. Kecamatan jelutung = 7.892 jiwa/Km<sup>2</sup>
4. Kecamatan pasar jambi = 3.132 jiwa/Km<sup>2</sup>

5. Kecamatan telaniapura = 3.185 jiwa/Km<sup>2</sup>
6. Kecamatan danauteluk = 764 jiwa/km<sup>2</sup>
7. Kecamatan pelayangan = 874 jiwa/Km<sup>2</sup>
8. Kecamatan jambi timur = 3.921 jiwa/Km<sup>2</sup>

Peningkatan di atas juga berbanding lurus dengan hasil proyeksi jumlah penduduk di kota jambi di mana berdasarkan hasil proyeksi dari tahun 2016-2025 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 583.671 jiwa, pada tahun 2017 sebanyak 591.376 jiwa, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 599.182 jiwa. Tahun 2019 sebanyak 607.091 jiwa. Tahun 2020 jumlah tersebut meningkat menjadi 615.104 jiwa kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 623.224 jiwa. Tahun 2022 menjadi 631.450 jiwa, tahun 2023 menjadi 539.786 jiwa. Kemudian tahun 2024 menjadi 648.231, dan puncaknya pada tahun 2025 menjadi 656.787 jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk di atas dapat di asumsikan akan berimplikasi positif bagi meningkatnya investasi atau penanaman modal di kota jambi, sebab semakin besar jumlah penduduk maka semakin banyak kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat kota jambi yang harus terpenuhi. Pertumbuhan penduduk tersebut juga akan mencerminkan lahirnya penduduk usia produktif yang cukup besar bahkan jumlah penduduk yang semakin meningkat akan semakin memperbanyak inovasi-

inovasi penduduk dalam berbagai sektor pekerjaan, sebab penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya di tengah pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Ini merupakan peluang yang memberikan bagai hadirnya peningkatan penanaman modal di kotajambi. Penanaman modal yang tinggi akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan dan hal ini akan selaras dengan semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat di

### **3.4 Kondisi Perekonomian**

#### **3.4.1 Pertumbuhan Ekonomi**

salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kemampuan faktor-faktor produksi yang merangsang bagi berkembangnya ekonomi daerah dalam skala yang lebih besar. Searah dengan kebijaksanaan pemerintah setelah mulai diterapkannya otonomi daerah kabupaten/kota sejak tahun 2001, diharapkan pembangunan di daerah dapat lebih mendorong pemerataan pembangunan, dan juga mempercepat pemulihan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan berdampak pada semakin meningkatnya pendapatan penduduk yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah tabungan masyarakat. Artinya, semakin besar jumlah pendapatan yang dapat diterima oleh masyarakat, maka akan semakin besar pula dana yang dapat dihimpun oleh pihak perbankan. Begitu pula sebaliknya, apabila tingkat pendapatan masyarakat menurun, maka kecenderungan untuk menabung juga akan semakin rendah. Sejalan dengan proses pembangunan, berbagai kegiatan ekonomi yang baru banyak tumbuh untuk mengisi kekosongan antara kegiatan ekonomi yang semakin panjang dan kait mengait.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Regresi Linier Berganda

Hasil regresi meliputi penyajian hubungan antara Variabel dependen yaitu Pjtk daerah dengan variabel independen yaitu Jumlah penduduk, PDRB perkapita dan Pertumbuhan penduduk. Adapun Estimasi persamaan regresi linear Berganda Dalam Penelitian ini Menggunakan Program SPSS V22, Dari Output SPSS diperoleh hasil Sebagai Berikut :

**Tabel 4.1**

**Hasil Regresi Linier berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	9.117	2.872		3.174	.019
	Ln_X1	.179	.179	.096	1.004	.354
	Ln_X2	.766	.084	.830	9.107	.000
	Ln_X3	.408	.132	.278	3.102	.021

*Sumber: data diolah SPSS V.22*

Berdasarkan Hasil Output diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 9,117 + 0,179 X_1 + 0,766 X_2 + 0,408 X_3$$

1. Konstanta (a)

Nilai Konstanta sebesar 9.117, artinya jika variabel bebas nol, maka besarnya Pajak daerah di Kota Jambi bernilai sebesar 9.117.

2. Koefisien regresi variabel Jumlah Penduduk (X<sub>1</sub>)

Nilai koefisien regresi variabel Jumlah Penduduk (X<sub>1</sub>) yang diukur dari lama sekolah sebesar 0.179 bernilai positif maka dapat diartikan apabila Jumlah Penduduk mengalami kenaikan sebesar 1 Jiwa, Maka Pajak Daerah akan meningkat sebesar 0.179 Rupiah Per orang.

3. Koefisien regresi variabel PDRB Perkapita (X<sub>2</sub>)

Nilai koefisien regresi variabel PDRB Perkapita (X<sub>2</sub>) Yang diukur dari Perkapita sebesar 0.766 bernilai positif maka dapat diartikan apabila PDRB Perkapita mengalami kenaikan sebesar 1 Rupiah maka akan menaikkan Pajak daerah sebesar 0.766 Rupiah Per orang.

4. Koefisien regresi variabel Pertumbuhan Ekonomi (X<sub>3</sub>)

Nilai koefisien regresi variabel Pertumbuhan Ekonomi ( $X_3$ ) Yang di ukur dari Pertumbuhan sebesar 0.408 bernilai Positif maka dapat diartikan apabila Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1 Persen maka akan mengalami kenaikan Pajak daerah sebesar 0.408 Rupiah Per orang.

#### 4.1.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan sebagai syarat dalam menggunakan model regresi yang diperoleh apakah merupakan estimasi yang tepat. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah sebagai berikut :

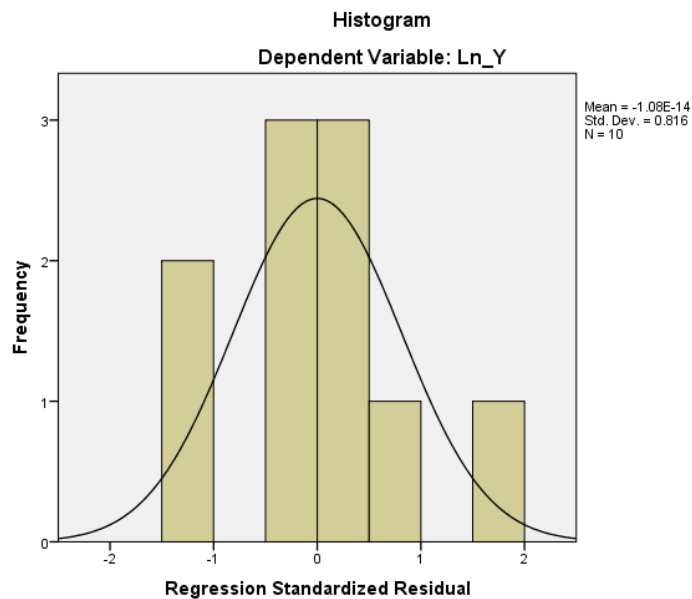
##### 4.1.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan yang harus dilakukan dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu metode untuk mengetahui normalitas adalah dengan menggunakan metode analisis grafik, baik dengan melihat grafik secara histogram atau dengan melihat secara *Normal*

*Probability Plot*. Normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik normal P-Plot atau dengan melihat histogram dari residualnya.

Uji normalitas dengan grafik normal P-Plot akan membentuk satu garis lurus diagonal, kemudian plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi normal garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Uji normalitas yang pertama dengan melihat grafik secara histogram dan grafik normal P-Plot sebagaimana terlihat pada gambar 4.2 sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji normalitas**



Sumber:SPSS v22

Berdasarkan kurva di atas membentuk kurva normal dan sebagian besar bar/batang berada di bawah kurva, maka variabel berdistribusi normal.

#### 4.1.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu pada waktu atau ruang sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya masalah ini, dapat digunakan uji Durbin-Watson (DW).

**Tabel 4.3**

#### **Hasil Uji autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.979 <sup>a</sup>	.958	.938	.15780	2.447

a. Predictors: (Constant), Ln\_X3, Ln\_X2, Ln\_X1

b. Dependent Variable: Ln\_Y

Dari hasil output uji DW yang telah dilakukan, didapatkan hasil Durbin-Watson stat sebesar 2.447. Sedangkan nilai dU di dapat melalui tabel dw dengan jumlah sampel 10(N) dan jumlah variabel bebas (K) 3 maka di dapat nilai dw sebesar 2.447. Berarti  $dU < dW < 2.447 > 2.0163$  maka dapat dikatakan terdapat autokorelasi.

#### 4.1.2.3 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan antar variable independent Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada table *coefficient* berikut ini :

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji multikolinieritas**

Model		Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.117	2.872		
	Ln_X1	.179	.179	.760	1.316
	Ln_X2	.766	.084	.835	1.198
	Ln_X3	-.408	.132	.862	1.161

Hasil Pengujian Uji Multikolinieritas dapat dibahas sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk ( $X_1$ )

Dari hasil output di atas variabel Jumlah Penduduk diperoleh nilai VIP sebesar 1.316 yang berarti  $VIP < 10$ . Berdasarkan hasil tersebut maka disimpulkan bahwa variabel Jumlah Penduduk tidak mempunyai korelasi terhadap variabel lainnya, dengan kata lain variabel Jumlah Penduduk tidak terjadi multikolinieritas.

2. PDRB Perkapita ( $X_2$ )

Dari hasil output di atas variabel PDRB Perkapita diperoleh nilai VIP sebesar 1.198 yang berarti  $VIP < 10$ . Berdasarkan hasil tersebut maka disimpulkan bahwa variabel PDRB

Perkapita tidak mempunyai korelasi terhadap variabel lainnya, dengan kata lain variabel PDRB Perkapita tidak terjadi multikolinearitas.

### 3. Pertumbuhan Ekonomi ( $X_3$ )

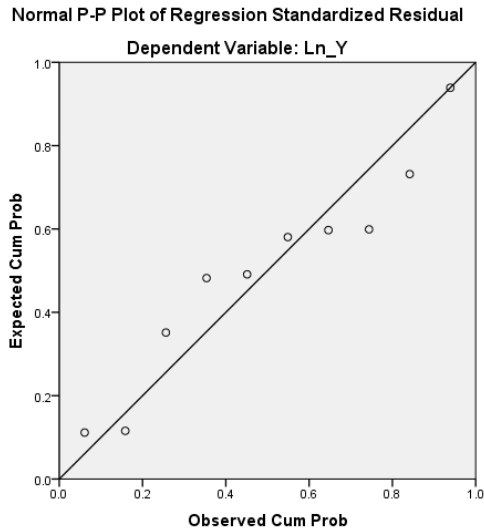
Dari hasil output di atas variabel Pertumbuhan Ekonomi diperoleh nilai VIP sebesar 1.161 yang berarti  $VIP < 10$ .

Berdasarkan hasil tersebut maka disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak mempunyai korelasi terhadap variabel lainnya, dengan kata lain variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak terjadi multikolinearitas.

#### **4.1.2.4 Uji Heteroskedasitas**

##### **Gambar 4.1**

##### **Hasil Uji Heteroskedasitas**



Sumber:SPSS v22

Berdasarkan Hasil output diatas Titik titik data menyebar dan titik titik juga tidak berkumpul adapun titik titik juga tidak berpolasehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.1.3 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian dilakukan Uji F dan Uji t. uji hipotesis ini dimana seperti tujuan penelitian yang ada di bawah ini :

- Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk, PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Jambi periode 2010-2020.
- Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk, PDRB perkapita dan



pertumbuhan ekonomis secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah Kota Jambi periode 2010-2020.

#### 4.1.3.1 Uji Simultan (Uji F)

Pengujian terhadap variabel independen dalam model dapat dilakukan dengan uji simultan (Uji F). Uji F statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Dari regresi pengaruh Jumlah penduduk, PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Jambi tahun 2010 – 2020 dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0.05).

**Tabel 4.5**

**Hasil Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.442	3	1.147	46.082	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.149	6	.025		
	Total	3.592	9			

a. Dependent Variable: Ln\_Y

b. Predictors: (Constant), Ln\_X3, Ln\_X2, Ln\_X1

Berdasarkan Tabel 4.5, hasil uji F di atas menunjukkan bahwa Nilai F tabel pada ( $df_1 = 4 - 1 = 3$ ;  $df_2 = 9 - 3 = 6$ ) adalah 4.76, Sedangkan F hitung yang di peroleh dari Output SPSS seperti terlihat pada Tabel 4.5 adalah sebesar 46.082, Jadi  $F_{hitung} > F_{tabel}$ . Atau juga bisa dilihat dari nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi yang di gunakan

yaitu sebesar 0,05 atau  $0,000 < 0,05$  Hal ini berarti bahwa penelitian ini dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen yaitu Jumlah penduduk (X1), PDRB Perkapita (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi(X3) secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Pajak daerah(Y). Oleh karenanya, penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa yaitu Jumlah penduduk (X1), PDRB Perkapita (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi(X3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependennya yaitu Pajak daerah (Y).

#### 4.1.3.2 Uji Parsial(Uji t)

Uji t Untuk regresi adalah untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual. Terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Jumlah penduduk, PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Jambi.

**Tabel 4.6**

**Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	9.117	2.872		3.174	.019
	Ln_X1	.179	.179	.096	1.004	.354
	Ln_X2	.766	.084	.830	9.107	.000
	Ln_X3	.408	.132	.278	3.102	.021

Sumber: SPSS V22

Besarnya  $t_{tabel}$  dengan ketentuan  $\alpha = 0,05$  dengan derajat kebebasan  $df = n - k - 1$  atau  $df = 4 - 1 = 3$ ;  $df_2 = 9 - 3 = 6$  sehingga diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2.447. Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, maka dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Pengujian secara Parsial, yaitu Jumlah Penduduk Berpengaruh terhadap Pajak Daerah.

Dari tabel nilai  $t_{hitung} = 1.004$  yang artinya  $t_{hitung} < t_{tabel} (1.004 < 2.447)$  dengan signifikan  $0,354 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. artinya tidak terdapat pengaruh signifikan Jumlah Penduduk (X1) terhadap Pajak Daerah (Y) di Kota Jambi Tahun 2010 – 2020.

2. Pengujian secara Parsial, yaitu PDRB Perkapita Berpengaruh terhadap Pajak Daerah.

Dari tabel nilai  $t_{hitung} = 9.107$  yang artinya  $t_{hitung} > t_{tabel} (9.107 > 2.447)$  dengan signifikan  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. artinya terdapat pengaruh signifikan PDRB Perkapita (X1) terhadap Pajak Daerah (Y) di Kota Jambi Tahun 2010 – 2020.

3. Pengujian secara Parsial, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh terhadap Pajak Daerah.

Dari tabel nilai  $t_{hitung} = 3.102$  yang artinya  $t_{hitung} > t_{tabel} (3.102 > 2.447)$  dengan signifikan  $0,021 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. artinya terdapat pengaruh signifikan Pertumbuhan Ekonomi (X1) terhadap Pajak Daerah (Y) di Kota Jambi Tahun 2010 – 2020.

#### 4.1.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan proporsi pengaruh seluruh variable bebas terhadap variable terikat. Nilai koefisien determinasi dapat diukur dengan *R-Square*.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Koefisien determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.979 <sup>a</sup>	.958	.938	.15780	2.447

a. Predictors: (Constant), Ln\_X3, Ln\_X2, Ln\_X1

b. Dependent Variable: Ln\_Y

Sumber: SPSS V22

Berdasarkan hasil Output di atas terdapat nilai R-Square sebesar 0.958 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh Jumlah penduduk, PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Jambi adalah sebesar 95,8%. sedangkan sisanya 4,2% dipengaruhi variabel lain yang

tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Misalnya variabel Inflasi.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Pengaruh Jumlah penduduk, PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah secara Simultan**

Hasil uji F menunjukkan bahwa Nilai F tabel Pada ( $df_1 = 4 - 1 = 3$ ;  $df_2 = 9 - 3 = 6$ ) adalah 4.76, Sedangkan F hitung yang di peroleh dari Output SPSS seperti terlihat pada Tabel 4.5 adalah sebesar 46.082, Jadi F hitung  $>$  F tabel. Atau juga bisa dilihat dari nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi yang di gunakan yaitu sebesar 0,05 atau  $0,000 < 0,05$  Hal ini berarti bahwa penelitian ini dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen yaitu Jumlah penduduk (X1), PDRB Perkapita (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (X3) secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Pajak daerah (Y).

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Daisy, dkk. 2018 Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah pada pemerintah provinsi Sulawesi Utara Hasil penelitian jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

### **4.2.2 Pengaruh Jumlah penduduk, PDRB Perkapita dan**

## **Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah secara Parsial**

### **a. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Berdasarkan Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan Nilai koefisien regresi variabel Jumlah Penduduk ( $X_1$ ) yang diukur dari lama sekolah sebesar 0.179 bernilai positif maka dapat diartikan apabila Jumlah Penduduk mengalami kenaikan sebesar 1 Jiwa, Maka Pajak Daerah akan meningkat sebesar 0.179 Rupiah Per orang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang ada yang mengatakan apabila jumlah penduduk meningkat maka aktifitas perekonomian suatu daerah juga akan meningkat dan hal tersebut tentunya akan berdampak positif pada penerimaan pajak daerah. Hal tersebut sama halnya dengan penelitian Susanto (2014:12) yang menyimpulkan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang positif terhadap PAD dimana pajak daerah merupakan sub – sektor PAD.

### **b. Pengaruh PDRB Perkapita terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Berdasarkan Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan Nilai koefisien regresi variabel PDRB Perkapita ( $X_2$ ) Yang diukur dari Perkapita sebesar 0.766 bernilai positif maka dapat diartikan apabila PDRB Perkapita mengalami kenaikan sebesar 1 Rupiah maka akan menaikkan Pajak daerah sebesar 0.766 Rupiah Per orang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang ada yang mengatakan apabila aktifitas perekonomian meningkat maka hal ini juga akan

berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Menurut Miyasto (2003) semakin meningkatnya pendapatan, jumlah kekayaan, dan besarnya pengeluaran konsumsi seseorang maka semakin tinggi tingkat kemampuan orang ( wajib pajak ) dalam membayar pajak. Seperti halnya penelitian supriadi (2009 : 533) menjelaskan bahwa setiap adanya peningkatan PDRB berpengaruh positif terhadap pajak daerah.

### **c. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Berdasarkan Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan Nilai koefisien regresi variabel Pertumbuhan Ekonomi ( $X_3$ ) Yang diukur dari Pertumbuhan sebesar 0.408 bernilai Positif maka dapat diartikan apabila Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1 Persen maka akan meningkatkan Pajak daerah sebesar 0.408 Rupiah Per orang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang ada yang mengatakan apabila perputaran perekonomian yang baik dan positif maka akan mengarah kepada pendapatan masyarakat yang tentunya meningkatkan kemampuan seseorang dalam membayar pajak (Sasana, 2005:24). Seperti halnya penelitian Seperti halnya penelitian supriadi (2009 : 533) menjelaskan bahwa setiap adanya peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pajak daerah.

## **BAB V**

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh Jumlah penduduk, PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Jambi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk, PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap Pajak Daerah di Kota Jambi dengan koefisien Determinasi sebesar 95,8%.
2. a. Jumlah penduduk secara Parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah di Kota Jambi Tahun 2010 – 2020.  
b. PDRB Perkapita secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah di Kota Jambi Tahun 2010 – 2020. Dengan koefisien regresi sebesar 0,830.  
c. Pertumbuhan Ekonomi secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2010 – 2020. Dengan koefisien regresi sebesar 0,278.



## 5.2 Saran

Setelah menguraikan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang dapat digunakan bagi pengambilan kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk meningkat maka aktifitas perekonomian suatu daerah juga akan meningkat dan hal tersebut tentunya akan berdampak positif pada penerimaan pajak daerah. Hal ini lah yang dapat berpengaruh positif seperti pada penelitian ini, harapan untuk pemerintah dapat benar – benar memaksimalkan potensi yang di miliki kota jambi untuk meningkatkan kebijakan penerimaan pajak kepada sumber daya manusia nya.
2. Meningkatkan beberapa sektor yang dominan memberikan sumbangan terhadap PDRB Perkapita, semakin meningkatnya pendapatan, jumlah kekayaan, dan besarnya pengeluaran konsumsi seseorang maka semakin tinggi tingkat kemampuan orang ( wajib pajak ) dalam membayar pajak.
3. Pertumbuhan ekonomis secara nasional maupun regional hendaknya merata menyebar ke setiap golongan penduduk miskin yang ada di kota maupun di desa. Diharapkan kedepannya dapat dilaksanakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan pendapatan serta pemerataan hasil-hasil ekonomis seluruh golongan masyarakat,

sertadilakukanupayapeningkatanpertumbuhanekonomi di masing-masing wilayah.

denganmengandalkanpotensi-potensi yangdimiliki, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak untuk daerah di kota Jambi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Prakosa, Kesit. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press Yogyakarta. Yogyakarta.
- Jhingan, M. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja GrafindoPersada. Jakarta Utara.
- Sukirno, Sadono. 2016. *Makroekonomiteoripengantar* PT Raja GrafindoPersada. Jakarta Utara.
- Daisy, dkk. 2018. *Analisis Faktor-Faktor Yang MempengaruhiPenerimaan Pajak Daerah pada PemerintahProvinsi Sulawesi Utara*. FakultasEkonomi dan Bisnis Prodi Magister Ilmuekonomi Universitas Sam Ratulangi. Jurnal
- Sari, Dian. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang MempengaruhiPenerimaan Pajak Daerah di Provinsi Bengkulu*. FakultasEkonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu. Jurnal
- Saputra, 2018. *Analisis Faktor-Faktor Yang MempengaruhiPenerimaan Pajak Daerah di Kota Cilegon*.FakultasIlmuEkonomi. Universitas Islam Indonesia.
- Saputro 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah*. FakultasEkonomika Dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Helti, 2010 *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah Serta Tingkat Efisiensi dan EfektivitasdalamPemungutan*.FakultasEkonomi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Undang – Undang No 28 Tahun 2009 ( tentangpajakdaerah dan retribusidaerah )
- Verawati. Dkk .faktor-faktor yang mempengaruhipenerimaanpajakdaerahprovinsi Kalimantan timur.
- Nadya, . 2018. Analisisfaktor-faktor yang mempengaruhipenerimaanpajakdaerah Kota Tegal.
- Alfian .2010 .analisisfaktor-faktor yang mempengaruhipenerimaanpajakdaerah di Kota Surakarta ( tahun 1994 – 2017 )
- Sukmawati .2018 .analisisfaktor-faktor yang mempengaruhipenerimaanpajakdaerah di kota Medan.

- Qusyaeri .2017 .faktor-faktorinflasi dan  
penanggulangannyadalamperspektifekonomiislam .
- Rukman .dkk .2019 .faktor-faktor yang mempengaruhipenerimaanpajakdaerah  
di kotaSamarinda .
- Ridwan .dkk .analisisfaktor-faktor yang  
mempengaruhipenerimaanpendapatanpajakdaerah.
- Tahwin .identifikasifaktor-faktor yang mempengaruhipenerimaanpajakdaerah.
- Yohan dwi .dkk .faktor yang  
mempengaruhipenerimaanpajakdaerahkabupatenjember .
- Nastiti.analisisfaktor-faktor yang mempengaruhipajakdaerah.

<b>Ln_X1</b>	<b>Ln_X2</b>	<b>Ln_X3</b>	<b>Ln_y</b>
13.19	20.45	6.50	24.29
13.21	20.58	6.55	24.81
13.22	21.70	7.64	25.02
13.24	21.81	6.75	25.24
13.25	21.93	6.71	25.58
13.26	22.03	6.32	25.72
13.28	22.15	6.52	25.79
13.29	22.22	6.15	26.03
13.30	22.30	6.31	26.10
14.31	22.35	6.17	26.27
14.32	22.32		26.10

**Lampiran 2**

```

REGRESSION
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Ln_Y
  /METHOD=ENTER Ln_X1 Ln_X2 Ln_X3
  /SCATTERPLOT=( *SRESID , *ZPRED)
  /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)
  /SAVE PRED RESID.
  
```

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Ln_X3, Ln_X2, Ln_X1 <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: Ln\_Y

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.979 <sup>a</sup>	.958	.938	.15780	2.447

a. Predictors: (Constant), Ln\_X3, Ln\_X2, Ln\_X1

b. Dependent Variable: Ln\_Y

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.442	3	1.147	46.082	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.149	6	.025		
	Total	3.592	9			

a. Dependent Variable: Ln\_Y

b. Predictors: (Constant), Ln\_X3, Ln\_X2, Ln\_X1

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.117	2.872		3.174	.019		
	Ln_X1	.179	.179	.096	1.004	.354	.760	1.316
	Ln_X2	.766	.084	.830	9.107	.000	.835	1.198
	Ln_X3	-.408	.132	-.278	-3.102	.021	.862	1.161

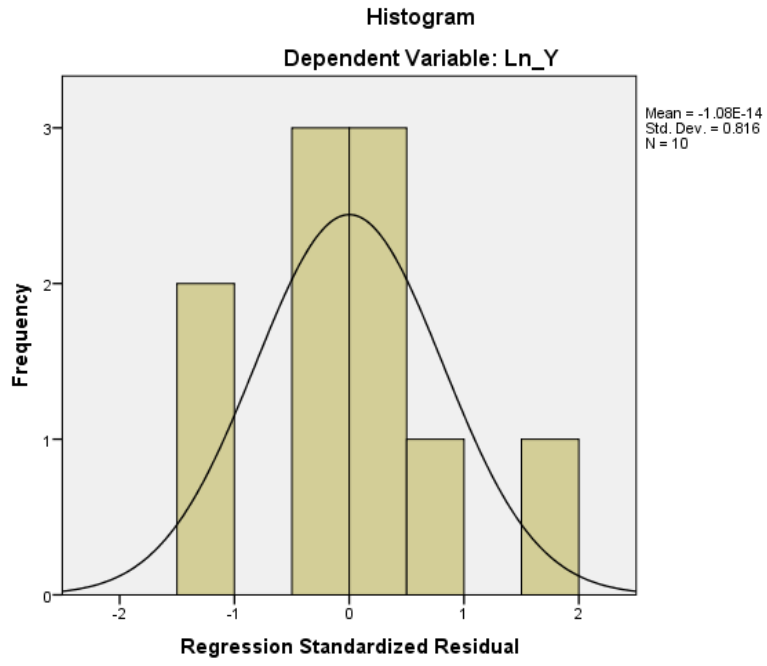
a. Dependent Variable: Ln\_Y

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Ln_X1	Ln_X2	Ln_X3
1	1	3.996	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.004	33.136	.00	.02	.03	.67
	3	.000	90.899	.06	.26	.95	.02

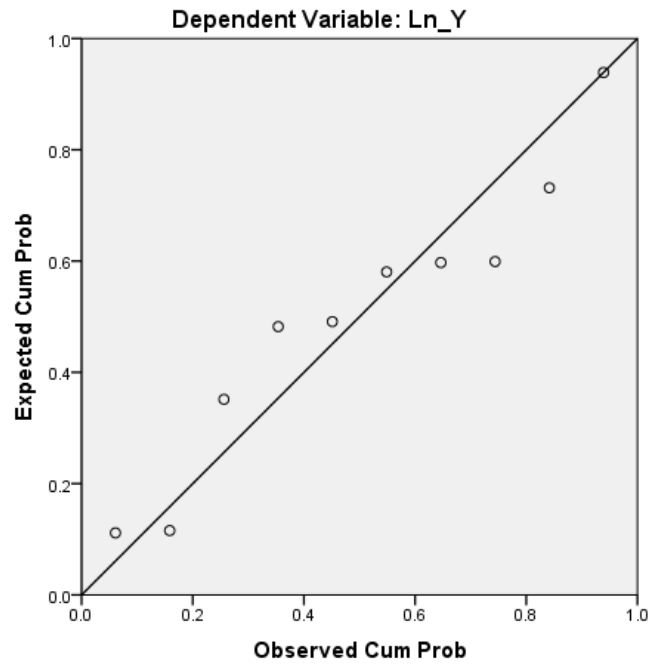
4	.000	139.951	.94	.73	.02	.32
---	------	---------	-----	-----	-----	-----

a. Dependent Variable: Ln\_Y





Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot

